

## Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Yannisa Rahmawati<sup>1</sup>, Ayu Anggraini<sup>2</sup>, Muhammad Arief Billah<sup>3</sup>, Deo Radja Saputra<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu

yannisarahmawati@gmail.com

**Abstrak:** Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit merupakan nilai atas informasi yang diberikan pada laporan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai (user) dalam pengambilan keputusan. Pencapaian opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara terhadap Organisasi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang dapat mendukung pencapaian opini tertinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi SIMDA serta pengawasan oleh inspektorat.

Kata Kunci : SIMDA, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah

### 1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dan realisasi pengaturan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk mencapai *good governance (accounting for governance)*. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan dibidang keuangan Negara seluruhnya mengarahkan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia semakin berkembang, ditandai dengan

adanya UU No.17 th 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 th 2014 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No.15 th 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang dimiliki oleh BPK semakin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik yang transparan. Akuntabilitas disini dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah. Akuntabilitas juga bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu mendukung dalam proses pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakainya. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai (user) untuk pengambilan keputusan. Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

## 2. Landasan Teori

### 2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemberi kerja (prinsipal) dengan penerima perintah (agen). Dalam permasalahan keagenan yaitu

agen ingin memaksimalkan fungsi utilitasnya karena memiliki informasi yang cukup lengkap, sedangkan prinsipal berusaha memotivasi agen agar mengeluarkan effort dengan cara memberi reward yang bertujuan untuk mendapatkan output yang optimal dari agen (Gudono, 2017).

Teori keagenan muncul ketika prinsipal mempekerjakan individu yang disebut agen untuk melaksanakan pekerjaan, kemudian mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam konteks manajemen keuangan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang wajib menyajikan informasi atas laporan keuangan bagi prinsipal. Akuntabilitas publik yaitu segala bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya.

### 2.2. Teori Pengelolaan (Stewardship Theory)

Teori ini terbangun karena manusia memiliki hakikat dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas serta kejujuran untuk kepentingan publik atau stakeholder. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa yang menjadi dasar tindakan seorang manajer adalah kepentingan bersama atau kepentingan organisasi. Teori pengelolaan mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan prinsipal.

### 2.3. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan ialah pengarahan

langsung yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan penting dilakukan sebagai upaya menjamin terlaksananya suatu kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan keuangan pemerintah daerah dilakukan terhadap anggaran keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

#### **2.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dijelaskan SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan upaya pencegahan serta pendeteksian penggelapan (*fraud*).

#### **2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang kian maju dapat membangun jaringan sistem informasi manajemen, memudahkan proses kerja, mengubah budaya *face to face* menjadi *face to technology*. Demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik wajib mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi pengelola keuangan maupun

pengguna laporan keuangan akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi-informasi berkaitan dengan laporan keuangan.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional.

Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang sedang terjadi di lingkungan kantor Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu mengenai nilai informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang tercantum dalam IHPS I BPK RI tahun 2020.

#### **3.2. Pendekatan Kualitatif**

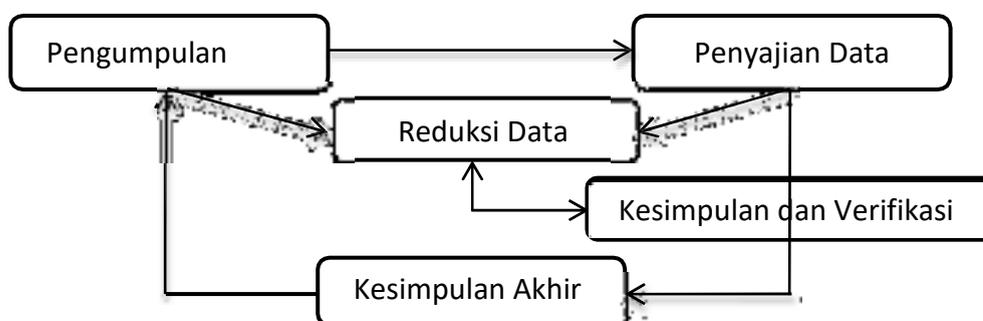
Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, fungsional organisasi, dan lainnya. Bogdan dan Taylor dalam V. Wiratna Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

### 3.3. Metode Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berlangsung secara terus menerus hingga data siap untuk direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan akhir. Mereduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan di lapangan.

Penyajian data berupa sekumpulan informasi hasil reduksi yang tersusun secara relevan dan bermakna, semakin mudah dipahami serta memudahkan dalam pengambilan tindakan selanjutnya. Penarikan kesimpulan yaitu hasil verifikasi selama penelitian dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya.

Gambar 1.  
Komponen Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model*)



untuk mendukung proses analisis data digunakan aplikasi data Nvivo yang merupakan software untuk menguji teori, mengidentifikasi tren, dan memeriksa informasi dengan mengklasifikasikan, mengurutkan, mengatur, memeriksa hubungan dalam data kemudian memodelkannya.

Nvivo akan membantu mencapai credibility, dependability dan confirmability sebagai penunjang pencapaian kualitas penelitian yang lebih baik. Prinsip dasar kerja Nvivo adalah mencari kata yang sama antara informan satu dengan informan lainnya. Nvivo mengakomodasi berbagai metode penelitian, termasuk analisis percakapan sehingga teknik pengumpulan data dengan

wawancara nantinya akan dapat diselesaikan dengan menggunakan

aplikasi ini hingga diperoleh kesimpulan valid.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Analisa Data

Hasil penelitian ini berupa pernyataan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Wawancara yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo menghasilkan informasi bahwa opini dari BPK RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didukung oleh pemanfaatan teknologi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA) serta pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Sistem Pengendalian Intern dalam keuangannya menggunakan prosedur pengelolaan dalam aplikasi SIMDA serta pengawasan oleh Inspektorat, hal ini berarti bahwa SPI tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pemberian opini karena pengendalian intern tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi serta pengawasan.

## 4.2. Pembahasan

### a. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan apakah segala aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

“....Pengawasan keuangan kalau di OPD itu auditornya istilahnya, kami diaudit minimal satu tahun oleh tiga auditor yaitu dari inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi dan BPK....”

“....Pengawasan keuangan dilakukan oleh inspektorat daerah maupun inspektorat provinsi....”

### b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikoordinasikan di dalam organisasi untuk menjaga keamanan harta milik organisasi,

memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi.

“....Pengendalian Intern yang diberlakukan itu kita mengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Selain itu inspektoratlah yang memefang kendali dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah...”

“....dengan aplikasi SIMDA audit internal maupun audit kabupaten bisa terukur. Jadi ketika ada penyimpangan secara pembukuannya akan terdeteksi di SIMDA. Lain pihak kalau ada transaksi, ada pelaksanaan kegiatan dan lain-lain memerlukan bukti fisik, itu tugasnya auditor seperti inspektorat yang akan memeriksa langsung ke lapangan atau ke kami OPD apakah bukti laporan yang kami berikan sesuai....”

### c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah yaitu berupa program aplikasi komputer SIMDA yang merupakan fasilitas dari BPKP yang dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah guna mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara.

“....Sistem informasi keuangan yang dilaksanakan memakai program SIMDA keuangan. Jenisnya ada SIMDA keuangan ada SIMDA barang yang terintegrasi dari server

BPKAD ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu. Dengan aplikasi SIMDA ini sistem keuangan akan berjalan secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga proses pelaporan sehingga pengelolaan keuangan semakin transparan, akuntabel dan auditable....”

“....Saat ini memang betul teknologi informasi sangat bermanfaat terutama dibagian keuangan. Buktinya adalah pembukuan pemda yang dulu hanya manual, saat ini sudah menggunakan SIMDA....”

Peraturan Pemerintah No. 56 Th 2001 menjelaskan bahwa dalam melakukan laporan atas penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan melalui sistem informasi baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi. Penggunaan SIMDA diharapkan dapat membangun/meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan aplikasi komputer SIMDA diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan pengelolaan pelaporan keuangan agar terwujud laporan keuangan yang akuntabel.

## 5. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan tanggungjawab yang harus dicapai oleh setiap pemerintah daerah. Faktor-faktor yang dapat mendukung pencapaian opini tertinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan dalam

pengelolaan keuangan berupa aplikasi SIMDA serta pengawasan secara utuh yang dilakukan oleh inspektorat.

## Daftar Pustaka

Amirudin. (2016). Metode Penelitian Sosial. Sleman: Dua Satria Offset.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019 IHPS I Tahun 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2019.

D. Afrianti, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi UNDIP, Semarang (2011).

F. Mansur, E. Prasetyo dan R. Maiyani, 2017. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation Vol. 2 No. 2 (2017) 143-152

Gentles, Stephen J, et.all, (2015). Sampling in Qualitative of the Methods Literature dalam Tabel Flexible Sample Size Estimates Suggested by Authorts from Three Research Traditions. Article 5, The Qualitative Report Vol. 2 No. 11 (2015)

Gudono. (2017). Teori Organisasi. Sleman: Andi Offset. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/NVivo>. Aplikasi pengolah kata untuk penelitian Kualitatif.

J. Lukito Setiawan, 2016. NVivo Sebagai Alat Bantu Analisis Data Kualitatif. The Learning University, Jurnal Universitas Surabaya No. 4 Vol. 21 (2016). <http://library.um.ac.id>

Kadir dan Triwahyuni. (2012). Pengenalan Teknologi Informasi. Solo: Andi Offset.

Moleong. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya

Penerbit, Permata Press Tim. (2015). OTODA (Otonomi Daerah) UndangUndang R.I No 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (PEMDA). Surabaya: Permata Press.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta: Pustaka Baru Press